

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dicanangkannya Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994 yang lalu, merupakan komitmen Korps Pendidikan yang menjadi utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan mensukseskannya. Pelaksanaan Gerakan Wajib Sembilan Tahun itu sudah dimulai pada tahun ajaran 1994/1995, dan sekaligus diberlakukan Kurikulum 1994. Gerakan itu merupakan salahsatu upaya tercapainya sasaran Pembangunan Jangka Panjang II, dan sejalan pula dengan empat strategi pokok dalam pembangunan pendidikan nasional sejak Repelita I sampai sekarang. Empat strategi pokok pembangunan pendidikan itu adalah : (1) peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan ; (2) peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan ; (3) peningkatan kualitas pendidikan ; dan (4) peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Empat strategi pokok itu selanjutnya perlu dijabarkan kedalam rencana dan prioritas yang bertitik-tolak pada tiga fungsi dasar dari Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : (1) mencerdaskan kehidupan bangsa ; (2) mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli yang diperlukan

dalam proses memasuki era industrialisasi ; dan (3) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan dalam era tinggal landas merupakan pembangunan yang mandiri dan harus didukung oleh kekuatan, prakarsa, dan dinamika masyarakat kita sendiri. Presiden Soeharto dalam membuka Musyawarah Nasional III Ikatan Sarjana Pendidikan Nasional (ISPI) pada tanggal 16 Juni 1994 mengatakan :

"Pembangunan kita tidak hanya memberikan perhatian kepada pembangunan kebendaan saja, tetapi juga pembangunan manusia yang serba dimensi. Pengalaman bangsa-bangsa lain yang telah maju menunjukkan bahwa pembangunan seperti itu belum tentu menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan, bahkan tidak jarang membawa dampak sosial budaya yang merendahkan kemanusiaan"

Diperkirakan pada abad ke-21 kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan globalisasi lainnya akan mempunyai pengaruh terhadap bangsa dan masyarakat kita. Antisipasi semuanya itu diperlukan manusia yang berkualitas, sejak dari dini ditanamkan nilai-nilai luhur oleh manusia (pendidik) yang berkualitas pula. Sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Bab III bahwa "Upaya pembangunan pendidikan masih perlu terus dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu menghasilkan manusia pembangunan yang berkualitas".

Namun kini masih dirasakan jumlah dan jenis lulusan pendidikan belum *link* antara perencanaan pendidikan dengan pengadaan tenaga kerja, dan harus *match* dengan kebutuhan tenaga terampil diberbagai bidang pembangunan. Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan diikuti oleh Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya serta kebijakan berupa Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 1989 yang merupakan usaha untuk mencapai relevansi, kualitas, dan efektivitas pendidikan.

Kondisi guru (pendidik) di Indonesia kini menggambarkan latar belakang pendidikan yang beraneka ragam, antara lain *disparitas* (tidak sejenis), ketersediaan guru daerah, terbatasnya kewenangan guru mengajar yang dimiliki lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan masih banyak ditemukan adanya guru yang mengajar diluar bidang keahliannya. Temuan itu sehubungan dengan pendapat S. Nasution (1987:160-161) tentang faktor-faktor yang memperlamban pembaharuan dalam pengajaran di sekolah, antara lain :

- (1) Keengganan masyarakat yang mencurigai perubahan karena anggapan bahwa pendidikan mereka terdahulu di sekolah baik, dan khawatir kalau-kalau pembaharuan justru membawa kerugian bagi anak-anak.
- (2) Para Penilik Sekolah dan Staf Kementerian Depdikbud tidak semua mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang proses belajar mengajar, mereka juga tidak

- mampu mendemonstrasikan metode-metode baru.
- (3) Administrasi sistem pendidikan terlampau dipusatkan dalam tangan pejabat-pejabat tertentu yang menjalankan pembaharuan melalui saluran birokratis.
 - (4) Guru-guru cenderung mempertahankan praktek-praktek rutin.
 - (5) Teori yang dibentuk berdasarkan penelitian, sering dalam situasi laboratorium, jarang ada kaitannya dengan masalah-masalah praktis dalam kelas.
 - (6) Sekolah pada hakekatnya konservatif dan terutama melihat tugasnya untuk menyampaikan kebudayaan masa lampau.
 - (7) Ide-ide baru dalam kebanyakan aspek kehidupan biasanya memakan waktu lama agar diterima secara umum, adakalanya puluhan bahkan ratusan tahun lamanya.

Guru sekolah dasar seharusnya minimal berpendidikan SD + 8 tahun atau SLTA + 2 tahun. T. Raka Joni (1992:28) mengatakan "... jenjang S1 dianggap sebagai persyaratan ideal pendidikan profesional prajabatan guru dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas". Sejalan dengan gerakan untuk memprofesionalisasikan jabatan guru dijenjang pendidikan dasarpun seyogianya secara selektif dapat dipekerjakan guru-guru dengan kualifikasi formal pendidikan jenjang S1. Kenyataan di lapangan kini masih terdapat guru Sekolah Dasar yang berpendidikan SD +4 tahun, berpendidikan SD + 6 tahun, dan ada juga yang sudah berpendidikan SD + 8 tahun atau Diploma II. Sebagaimana diketahui dengan SK Mendikbud No.0854/0/1989, guru Sekolah Dasar ditingkatkan persyaratan pendidikan prajabatannya menjadi jenjang D2. Engkoswara (1990b:123) mengharapkan

"pada awal memasuki proses tinggal landas, pendidikan tenaga kependidikan selanjutnya memasuki Program Sarjana Pendidikan (S1) yang berangsur-angsur menjelang akhir program pembangunan jangka panjang kedua berpendidikan (S2) atau Magister".

Sehubungan dengan pengangkatannya sebagai pejabat pemimpin pendidikan formal menurut Ngalim Purwanto (1975: 58) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :

- (1) Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah;
- (2) Mempunyai pengalaman kerja yang cukup terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya;
- (3) Memiliki kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan;
- (4) Mempunyai keahlian dan pengetahuan luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan dan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya;
- (5) Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya.

Sekolah yang bermutu secara langsung dapat ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menciptakan proses pendidikan yang merupakan komponen inti dari sistem pendidikan, karena jumlah sumberdaya pendidikan didayagunakan secara efisien. Yang dimaksud dengan sumberdaya pendidikan (Depdikbud, 1994:107) ialah "komponen pendidikan yang dapat mendorong terciptanya situasi yang kondusif untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuan belajar

murid ...". Proses pendidikan itu dapat dilihat dari proses manajemen sekolah dan proses pengajaran. Depdikbud (1994:108) menyebutkan "Proses manajemen sekolah yang bermutu ialah yang mampu mendayagunakan faktor-faktor input sehingga memungkinkan bagi terciptanya proses pengajaran yang bermutu". Faktor-faktor input dimaksud ditunjukkan oleh sumber-sumber pendidikan yaitu sumberdaya manusia (guru dan tenaga kependidikan lainnya), sarana/prasarana pendidikan, dan teknik/ metode pendidikan. Kepala Sekolah sebagai individu yang menempati kedudukan tertinggi di sekolahnya, ia dapat mempengaruhi bawahannya agar bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diembannya.

Bila disimak fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh Kepala Sekolah Dasar yang sesuai dengan berbagai teori administrasi pendidikan sebagai ilmu yang harus dimilikinya dan berbagai ketentuann dari pejabat yang berwenang, maka perlu dipersiapkan kepala sekolah yang profesional dan dilakukan dengan salah satu usaha adalah meningkatkan pendidikannya minimal berpendidikan SD + 8 tahun atau SMTA + 2 tahun. Namun kita tahu bahwa dukungan anggaran untuk program penyetaraan (Diploma II) yang diikuti oleh Kepala Sekolah Dasar sangat terbatas, akibatnya diperkirakan dalam jangka sepuluh tahun saja program

penyetaraan dimaksud belum tentu akan dapat diselesaikan, sementara masih ditekankan pula pada tujuan pemenuhan kebutuhan akan jumlah calon guru.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam mempersiapkan tenaga pendidik sekolah dasar yang potensial, sebenarnya jauh sebelumnya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Riau dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengambil langkah-langkah sebagai usaha untuk peningkatan mutu pendidikan, antara lain memberikan tugas belajar kepada tenaga kependidikan sekolah dasar (Kepala Sekolah, Guru, Staf Dinas P dan K) pada jenjang S0, S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi ilmu pendidikan di Sumatera dan Pulau Jawa.

Diharapkan investasi pendidikan tugas belajar tersebut tidak saja memberikan manfaat langsung kepada pribadi (konsumtif) tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial yang menumbuhkan kapasitas produktif. Kapasitas produktif tersebut (Noeng Muhadjir, 1992:51) dapat memberikan efek bermacam-macam, seperti:

- (a) angkatan kerja lebih produktif;
- (b) mobilitas sosial meningkat (mampu memilih cara yang lebih efisien dalam hal komunikasi, keuangan, transportasi, informasi, dan lain-lain);
- (c) dapat mengelola lebih baik sumber dan barang langka (lebih efektif dan dapat mencari substitusi);
- (d) mampu tumbuh mengikuti perubahan, berbeda dengan produk non-manusia; dan
- (e) memberi manfaat sepanjang hayat.

Dilihat dari segi ekonomi pendidikan bahwa produk pendidikan adalah "manfaat" pendidikan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Menurut Fakry Gaffar (1987:7) "keuntungan pendidikan ini bersifat jangka lama atau tidak *quick yielding*. Keuntungan pendidikan ini ada yang bersifat individual dan ada pula yang bersifat kemasyarakatan yang tidak langsung yang disebut dengan *spilt over benefit*".

B. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Variabel Penelitian

Salah satu usaha untuk mempersiapkan tenaga kependidikan sekolah dasar (Kepala Sekolah, Guru, dan Staf Dinas P dan K) yang profesional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Riau No. Kpts. 301/XI/1982 tanggal 11 Nopember 1982 memberikan tugas belajar kepada tenaga kependidikan tersebut diatas. Kenyataan sekarang masih terus berlangsung tugas belajar pada program S2 (Magister) di IKIP Bandung sesuai dengan memorandum kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dengan Rektor IKIP Bandung No. 5516/PT.25.L/Q/1989 tanggal 6 Oktober 1989 dan SKB antara Kepala Dinas P dan K Dati I Propinsi Riau dengan Direktur Program Pasca Sarjana IKIP Bandung No. Kpts 072/A/420.1/89 dan Nomor. 1017/PT.25.H4.PPS/U/89 tanggal 6 Oktober 1989. Segala pembiayaan yang berhubungan

dengan pendidikan tersebut dibebankan pada mata anggaran 21.0.16.1.01.043 dalam APBD Tingkat I Riau. Setelah tenaga kependidikan tersebut diatas mengakhiri pendidikannya diharapkan kembali dan bekerja dilingkungan Pendidikan Dasar pada Dinas P dan K Dati I Propinsi Riau. Kembalian ini sesuai dengan apa yang dikatakan Beeby oleh Fakry Gaffar (1987:117) bahwa "Pendidikan itu mempunyai kualitas tinggi bilamana output pendidikan itu mempunyai nilai bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan itu".

Selain itu diharapkan pula output pendidikan dapat merubah "perilaku" individu kearah yang lebih baik lagi, sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya (kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lainnya) yang akan dibawanya manakala individu itu akan memasuki lingkungan (sekolah) yang punya karakteristik tersendiri pula, seperti tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, dan lainnya. Sehubungan dengan perilaku itu Miftah Thoha (1993:34) mengungkapkan formula David A Nadler, ed.al, yaitu : $P = F(I, L)$. Ungkapan itu dapat dibaca "perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya". Sikun Pribadi (1981:26) sebelumnya menekankan bahwa "pandangan behavioral dalam masalah kepemimpinan perlu mendapatkan perhatian kita yang sebesar-besarnya, karena fenomena kepemimpinan pada

dasarnya adalah fenomena perilaku".

Pendekatan sifat kepribadian terhadap kepemimpinan telah memberikan beberapa pandangan yang deskriptif tetapi sedikit mengandung nilai yang prediktif. Apa kepribadian itu? Kantao (1992:49) mengemukakan pendapat Gordon W Allport yaitu "*Personality is the dynamic organization of those psychophysical systems, that determines his unique adjustment to his environment*".

Penelitian ini berusaha menemukan suatu model profil kepemimpinan kepala sekolah yang dapat mempengaruhi kinerja sekolah. Dari latar belakang dan fokus masalah akan pentingnya Profil Kepala Sekolah yang dapat mempengaruhi kinerja Sekolah Dasar Negeri dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia, maka dirumuskan :

"Sejauh manakah profil kepemimpinan Kepala Sekolah dapat mempengaruhi kinerja Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya".

Dari rumusan masalah ini akan dirinci untuk dijadikan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah faktor-faktor seperti : berbagai pedoman, peraturan, instruksi, pembinaan dari pengawas/penilik sekolah dan atasan lainnya, latar belakang/ tingkat pendidikan, pengalaman, pelatihan, dukungan personal, dan fasilitas sarana prasarana dapat mempengaruhi

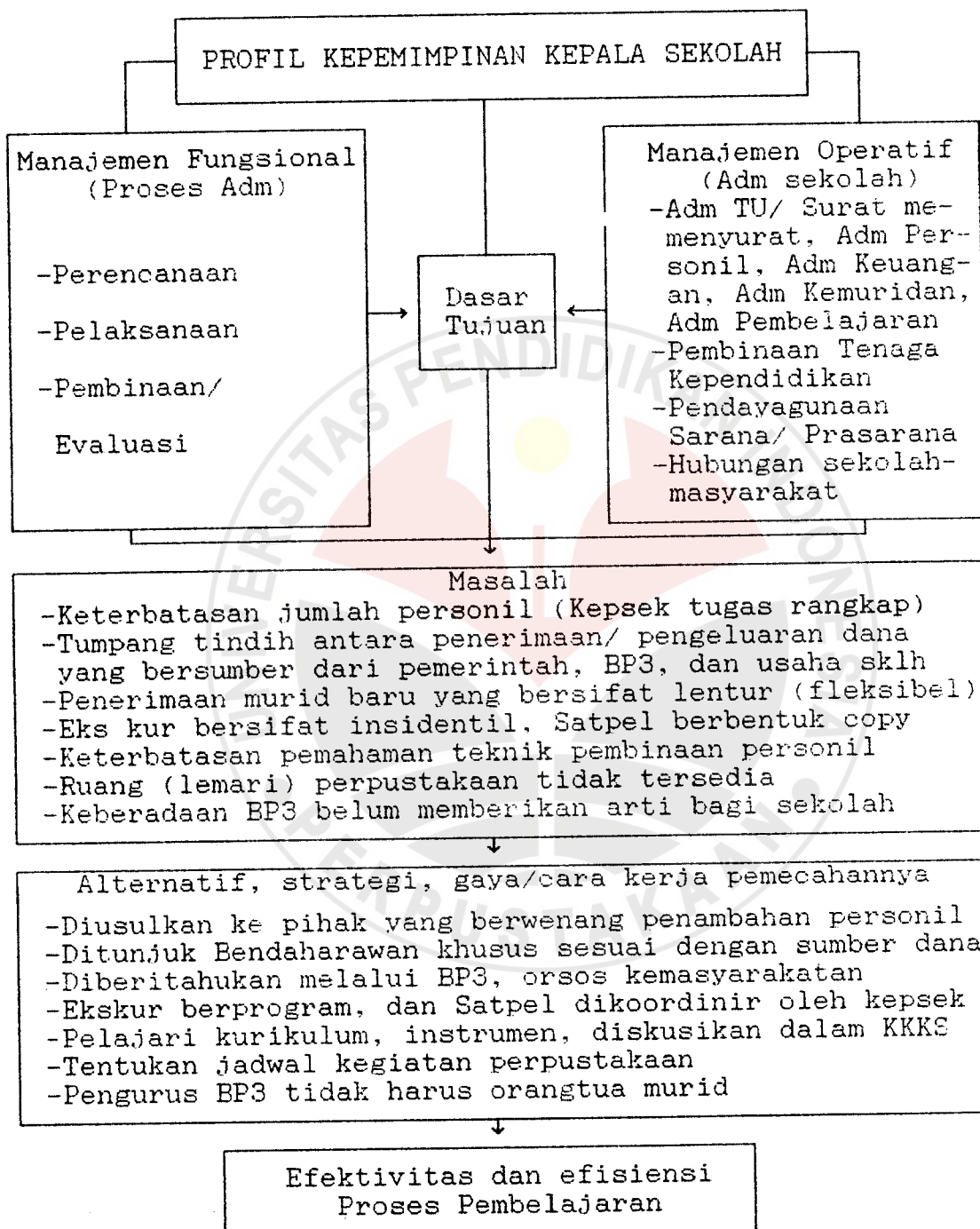
kinerja Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran ?

- b. Apakah Kepala Sekolah telah melaksanakan pengelolaan fungsi pokok administrasi pendidikan, seperti kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan pembinaan/ evaluasi sehubungan dengan penyelenggaraan pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya ?
- c. Apakah Kepala Sekolah telah mengembangkan dengan baik tugas pokok tata laksana administrasi sekolah, seperti tata usaha/ surat menyurat, adm personil, adm keuangan, adm kemuridan, dan adm program pembelajaran.
- d. Apakah Kepala Sekolah telah memberikan pembinaan terhadap semua personil dalam diskusi kelompok, observasi kelas, pertemuan pribadi simulasi pembelajaran, dan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KEG) ?
- e. Apakah Kepala Sekolah telah dapat menciptakan dan mendayagunakan sarana/prasarana (pustaka, lab, aula, ruang ibadah, dan lapangan olahraga/seni) dengan efektif ?
- f. Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas perlu dukungan pihak lain (pemerintah, atasan, kolega, orang tua siswa dan masyarakat). Apakah kerjasama yang baik selama ini tetap dipelihara atau ditingkatkan ?

Keterkaitan antara masalah, tujuan, temuan studi lapangan, dan kesimpulan dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1

Keterkaitan antara masalah-tujuan-temuan-kesimpulan



C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran profil kepala sekolah yang bagaimanakah yang dapat mempengaruhi kinerja Sekolah Dasar Negeri dalam mengelola tugas pokok kepemimpinan di sekolahnya.

2. Tujuan Khusus

Berangkat dari tujuan umum diatas, maka tujuan khusus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang :

- a. Profil Kepemimpinan Kepala Sekolah, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal (pedoman, peraturan, pembinaan atasan, tingkat pendidikan, pengalaman, pelatihan, dukungan personil, dana, sarana prasarana) dan dapat pula dipengaruhi oleh faktor internal (watak kepribadian yang mencakup sifat-sifat cerdas-dewasa-sikap-perilaku, kemampuan, kebutuhan, komitmen, pengharapan).
- b. Pengelolaan fungsi pokok administrasi pendidikan perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan/evaluasi) yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah sehubungan dengan penyelenggaraan pembelajaran di sekolahnya.
- c. Tugas pokok dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam mengerjakan tata laksana dalam bidang operasional administrasi sekolah, (adm TU/surat menyurat, adm personil,

adm keuangan, adm kemuridan, dan adm pembelajaran.

- d. Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhadap personil sekolah sehubungan dengan kegiatan, (diskusi kelompok, observasi kelas, pertemuan pribadi/ face to face, simulasi pembelajaran, dan KKG).
- e. Pendayagunaan sarana/ prasarana yang tersedia untuk efektivitas pembelajaran, pustaka, labor, aula, ruangan ibadah, ruang UKS, tempat olahraga/seni, dan jamban/WC.
- f. Hubungan sekolah-masyarakat (pemerintah setempat, atasan, kolega, ortu/wali murid, organisasi pemuda, dan masyarakat) dalam rangka memberikan penjelasan bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Sejumlah fakta yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi baik diprogram maupun tidak diprogram dari suatu penelitian disusun dalam suatu disiplin yang dapat dipertanggungjawabkan untuk digeneralisasi berpedoman pada teori tertentu. Apabila tidak ada teori yang mendasari masalah yang diteliti maka perlu membuat formulasi dengan meninjau literatur yang relevan, sebab teori berguna untuk menjadikan pedoman penyusunan fakta-fakta yang dikumpulkan. Banyak batasan-batasan yang

menjelaskan tentang teori, namun batasan-batasan itu relatif tidak lengkap sebab mereka memandang sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang memandang, karena itu satu teori akan lebih lengkap apabila didukung oleh teori lainnya. Batasan-batasan tentang teori itu dikemukakan oleh berbagai pakar ilmu, antara lain :

- (1) Kenneler GF. (1966). mengemukakan. "...a theory is a group of laws which are deductively connected".
- (2) Kerlinger F & Pedhazur EJ. (1973), mengemukakan. "A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that presents a systematic view of phenomena by specifying relation among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena".
- (3) Black JA & Champion JD. (1976), mengemukakan. "A theory is a set of systematically related propositions specifying causal relationship among variables".
- (4) Laudan L. (1977). mengemukakan, "In the standard literature on scientific inference, as well as in common scientific practice the term 'theory' refers to at least two very types of things. We often use the term theory to denote a very specific set of related doctrines commonly called hypotheses or axioms or principles which can be utilised for making specific experimental predictions and for giving explanations of natural phenomena".
- (5) Borg WR & Gall MD, (1979), mengemukakan. "In simple terms a theory is an explanation of behavioral or physical events. The more 'powerful' a theory is the more events can be explained by it".
- (6) Rochman N, (1988) mengemukakan, teori yaitu, Suatu keseluruhan sistem berpikir yang menjadi rujukan untuk menghubungkan-hubungkan berbagai fenomena atau bagian-bagiannya secara deduktif.

Dari kutipan itu terlihat bahwa Laudan dengan pendekatan filosofisnya, dimana teori itu digunakan untuk

menunjukkan sifat yang umum tentang suatu hal, serangkaian doktrin- doktrin dan asumsi. Setiap kasus yang berhubungan dengan terminologi tidak saja mengacu kepada satu teori akan tetapi keseluruhan spektrum dari individual teori. Sementara Black and Champion lebih menekankan pada masalah sosial yang berhubungan dengan sosial sains.

Rochman (1988:5) memandang tentang guna teori bagi seorang peneliti dapat dijadikan asumsi oleh peneliti itu sendiri atau oleh peneliti lainnya tetapi dapat pula dijadikan hipotesis bagi peneliti lainnya. Kuntjaraningrat (1980:19) memandang pentingnya teori dalam suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan, kecuali menyimpulkan generalisasi- generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan, teori itu juga, memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian, memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi, mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi.

Batasan dan kegunaan sebuah teori dapat dikatakan bahwa kekuatan sebuah teori bergantung pada kemampuannya untuk memecahkan suatu masalah, bukan kebenaran, kepastian dan pengertiannya, sebab teori akan dipertahankan se-

panjang teori itu didukung oleh fakta-fakta. Suatu teori akan gugur oleh teori lainnya bila sudah tidak memenuhi keperluan dalam kehidupan manusia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Dinas/Instansi dilingkungan Dikbud Dati II Kab. Inhil. dalam rangka menyusun pengembangan personil, terutama mempersiapkan kepala sekolah yang profesional.

2. Kegunaan Praktis

Pertama: Sebagai masukan bagi Dinas P & K Dati II Inhil. yang berwenang sebagai penanggungjawab teknis administrasi pengelolaan SD di daerah kerjanya, dan sekaligus untuk peneliti yang bertugas pada dinas bersangkutan.

Kedua : Sebagai masukan bagi Kandep Dikbudkab Inhil, terutama Pengawas SD yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.

Ketiga : Sebagai masukan bagi Kepala SD di Kab Inhil dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan pendidikan agar terwujud proses pembelajaran yang efektif.

E. Paradigma Penelitian : Kerangka pikir penelitian dan Premis-premis

Thomas S Khun (1973:27) mengemukakan bahwa "*a paradigm is prerequisite to discovery of laws*". Maksudnya paradigma merupakan prasyarat untuk mencari hukum-hukum. Manasse Mallo (1986:32) mengemukakan paradigma yang

telah dirumuskan George Ritzer sebagai berikut :

"Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut".

Rochman Natawidjaja (1988:5) mengemukakan konsep pokok paradigma Simon yang menyatakan :

"Paradigma yaitu perangkat keyakinan mendasar atau metafisis yang merupakan sistem ide yang memberikan arah untuk menimbang dan membuat keputusan tentang hakekat realitas. atau memberikan alasan mengapa kita harus puas dengan mengetahui sesuatu yang kurang dari hakekat realita itu".

Sebelumnya Natawidjaja (1988:4) telah pula menyampaikan konsep pokok Simon tentang batasan asumsi sebagai berikut :

"Asumsi atau anggapan dasar yaitu sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti dan dijadikan dasar untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya. Asumsi itu tidak merupakan kebenaran yang diakui oleh yang mungkin didasari keyakinan tanpa bukti. Asumsi dapat pula berupa hasil penelitian sendiri sebelumnya, hasil penelitian orang lain, pernyataan orang lain. ... oleh karena itu asumsi yang diyakini seorang peneliti mungkin diragukan kebenarannya atau dijadikan hipotesis oleh peneliti lainnya".

Pernyataan tentang asumsi diatas sejalan dengan apa yang dinyatakan S Nasution, (1982) yaitu "Tiap penelitian memerlukan asumsi-asumsi yang diterima sebagai suatu yang benar tanpa pembuktian". Asumsi dan postulat dapat dipan-

dang sebagai dua kata yang bersamaan (W. Surakhmad. 1980: 107) yakni "sebuah anggapan dasar atau postulat adalah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik ...".

Berdasarkan paradigma dan asumsi diatas, bahwa paradigma penelitian ini merupakan acuan dan cara berpikir atau "*conceptual goggles*" yang ditampilkan oleh peneliti dalam mengamati/ memahami realitas objek yang ditelitinya.

- Asumsi yang dipergunakan dalam paradigma ini adalah
- (1). Peneliti dan subjek penelitian sebagai fenomena yang bercirikan interaktivitas memerlukan pendekatan tertentu, baik pendekatan terhadap interaktivitas itu sendiri ataupun pengaruh yang datang dari subjek penelitian.
 - (2). Fokus paradigma terletak pada pemahaman pertanyaan-pertanyaan penelitian berkait erat sehingga membentuk suatu pola jawaban kebenaran.

Visualisasi paradigma penelitian; kerangka pikir dan premis-premis ini dapat dilihat pada uraian berikut :

1. *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir penelitian merupakan jalan pikiran, kerangka acuan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut :

Pertama: Kemampuan Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsi

dan tanggung jawab pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti : pedoman, peraturan, pembinaan dari atasan, tingkat pendidikan, pengalaman, pelatihan, dukungan personil, dan sarana/prasarana lainnya.

Kedua : Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya berangkat dari fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan/evaluasi.

Ketiga : Tugas pokok yang harus dikerjakan oleh Kepala Sekolah adalah :

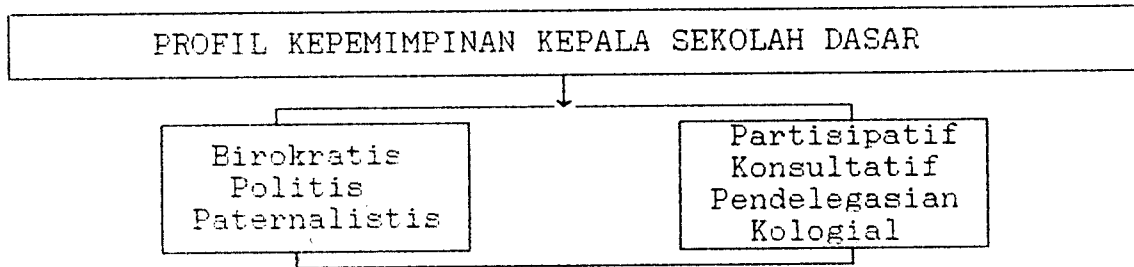
- (a) Mengerjakan tata laksana administrasi sekolah yang meliputi tata surat menyurat, melaksanakan pembinaan personil, membuat catatan keuangan, identitas siswa, dan membuat program pembelajaran.
- (b) Pembinaan kepada tenaga kependidikan (guru) melalui diskusi kelompok, observasi kelas, pertemuan pribadi (*Face to face*), simulasi pengajaran, dan KKG.
- (c) Pendayagunaan sarana/prasarana sekolah, (pustaka, lab, aula, ibadah, UKS, lapangan olahraga/seni, dan WC.
- (d) Menjaga hubungan baik sekolah-masyarakat (pemerintah setempat, atasan, orangtua/wali murid, dan kepemudaan.

Keempat: Semua kegiatan diatas bertujuan untuk mengefektif-efisiensikan pembelajaran dalam meningkatkan SDM.

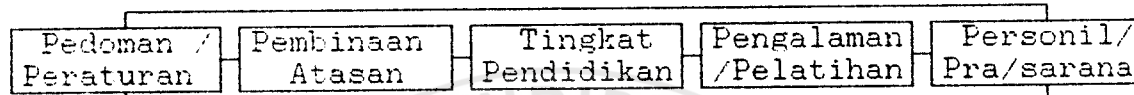
Kerangka pikir penelitian ini dituangkan dalam bentuk gambar, sebagai berikut :

Gambar 2
Kerangka Pikir Penelitian

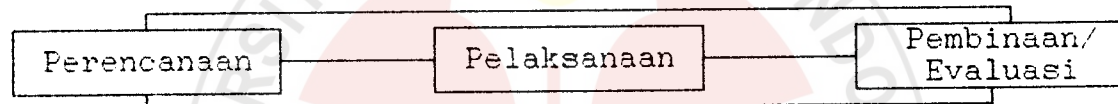
A. Gaya Kepemimpinan



B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Sekolah



C. Kemampuan Kepala Sekolah menyelenggarakan fungsi pengelolaan pendidikan



D. Kemampuan Kepala Sekolah mengemban tugas dan tanggung jawab

Tata Laksana Administrasi Sekolah : -Adm TU/Surat menyurat -Adm Personil -Adm Keuangan -Adm Murid -Adm Pembelajaran	Pembinaan Tenaga Kependidikan : -Diskusi klp -Observasi kls -Pertemuan individual -Simulasi pembelajaran -Pustaka prof	Pendayagunaan Sarana/ Prasarana : -Ruang Kelas -Perpustakaan -Lab / UKS -Ruang Ibadah -Aula -Tpt OR/Seni -Jamban/WC	Hubungan Sekolah-Masyarakat : -Pemerintah setempat -Kolega -Ortu/Wali Murid -Org Pemuda -Masyarakat
--	---	--	--

E. Tujuan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pembelajaran yang efektif dan efisien guna memperoleh sumber daya manusia yang memiliki produktivitas tinggi

2. Premis-premis

Dukungan esensial evidensi-evidensi ilmiah berdasarkan penelitian para pakar terdahulu, sebagai berikut:

- a. Profil Kepemimpinan Kepala Sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran dan kecenderungan perilaku Kepala Sekolah Dasar dalam memanage satuan pendidikan yang dipimpinnya. Kata "Profil" dapat diartikan (Dj. Kantao, 1992:6) sebagai "perawakan, kecenderungan bertingkah laku, penampilan seseorang, sosok, gambaran tentang kedudukan individu atau kelompok dalam konteks tertentu".
- b. Profil Kepala Sekolah dapat didekati dari tiga kompetensi (DA Tisnaamidjaja (1980:14) yaitu "kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan". Kompetensi pribadi itu (MI Soelaiman, 1990:16) "mencakup berupa sifat-sifat, sikap, pola tingkahlaku, ...".
- c. Perilaku kepemimpinan dapat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya, antara lain : kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lingkungan. Lingkungan (sekolah) punya karakteristik tersendiri seperti : tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, dan lainnya. Menurut Gordon W Alport dalam pernyataan yang dikutip oleh Kantao (1992 : 49) bahwa "kepribadian merupakan kesatuan organisasi yang dinamis

dari sistem psikofisik individu yang menentukan ke-unikan kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungannya'. Sesuai dengan formula David A Nadler, Et.al dalam pernyataannya yang dikutip oleh Thoha (1993:34) yaitu. $P = F(I,L)$ baca: 'perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya'.

- d. Kepala Sekolah dapat mengatur keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan dinas. dan konsisten terhadap budaya disiplin kerja dalam memanfaatkan waktu. Ada lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia (Kuntjaraningrat. 1983:31) yaitu "(1) hakekat hidup. (2) hakekat karya. (3) persepsi manusia tentang waktu. pandangan manusia tentang alam. dan (5) hakekat hubungan antara manusia dengan sesamanya".
- e. Faktor budaya dan faktor ekonomi sangat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Menko Kesra Azwar Anas pada Munas III ISPI mengatakan. "Kita memahami bahwa ketenggangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya disebabkan oleh faktor negatif dari budaya dan juga karena pula oleh faktor ekonomi yang masih melilitnya".
- f. Suksesnya suatu kepemimpinan diperlukan konsep diri yang jelas, seperti tentang koordinasi dan komunikasi dalam pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya yang ada maupun memberikan penekanan tentang pentingnya

peran dan kemampuan guru dalam membantu pembelajaran siswa. Clara R Pudjijoyanti (1988:5) menyebutkan bahwa "Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. Konsep diri mempunyai peranan dalam mempertahankan keselarasan bathin. Konsep diri mempengaruhi individu dalam menafsirkan pengalamannya. Konsep diri menentukan pengharapannya".

- g. Seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang tidak saja dapat memotivasi dirinya tetapi dapat pula membantu meningkatkan motivasi dan ability kinerja bawahan dan memberdayakannya. Keith Davis dalam pernyataannya yang dikutip oleh Thoha (1993 : 280) merumuskan empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu :
'(1) kecerdasan, (2) kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, (3) motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan (4) sikap-sikap hubungan kemanusiaan'.
- h. Pengelolaan keuangan yang sudah disalurkan dari pemerintah dan sumbangan dari masyarakat merupakan akuntabilitas Kepala Sekolah sebagai pimpinan dan dibantu oleh Bendaharawan Sekolah. UU-SPN No. 2 Tahun 1992 (penjelasan) dan Tap MPR No.II/MPR/1993 mengungkapkan satu sistem yang menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggungjawab bersama antara "keluarga, masyarakat, dan pemerintah". Oleh

karena itu setiap menggunakan dana sekolah dilengkapi dengan bukti-bukti.

- i. Efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah ditentukan oleh profil kepemimpinan kepala Sekolah. Ini dapat dilihat dalam penggunaan dana sekolah yang tersedia sesuai dengan pos-pos yang ada seperti: SBPP, BOP, EPOP, dan EP3.
- j. Kepemimpinan yang efektif dan efisien adalah kepemimpinan yang mampu membudayakan komitmen terhadap mutu, peningkatan mutu secara terus menerus, fokus pada pelanggan (guru, murid, orangtua/wali murid, usahawan, dan masyarakat) dengan memberikan layanan yang terbaik, kerjasama tim dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam organisasi sekolah.
- k. Kinerja sekolah bergantung pada efisiensi dan efektivitas interaksi fungsional dari berbagai unsur (guru, murid, kurikulum, fasilitas, dan dana) dapat digerakkan oleh Kepala Sekolah.
- l. Partisipasi masyarakat dalam memberikan motivasi kepada murid-murid agar tidak meninggalkan jam-jam belajar sekolah, termasuk assesment terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan sebagai titik berangkat dalam perbaikan kedepan.

Premis-premis penelitian: dapat dilihat pada gambar (bagan) sebagai berikut :

Gambar 3
Premis-premis Penelitian

